

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Bab ini menjabarkan mengenai gambaran umum dari objek penelitian tentang upaya *trust building* Pemerintah Kabupaten Klaten di era kepemimpinan Bupati Sri Mulyani. Sehingga pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum serta deskripsi mengenai lokasi dari penelitian. Bab ini digunakan untuk pembaca agar dapat mengenal lebih detail lokasi dan kondisi dari objek penelitian ini.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Klaten

Gambaran umum ini merupakan penjabaran dari kondisi wilayah Kabupaten Klaten. Kondisi umum dapat dilihat dari profil geografi, ekonomi, demografi, profil sosial hingga budaya. Kabupaten Klaten berada di Provinsi Jawa Tengah. Dasar terbentuknya Pemerintah Daerah Klaten ada pada UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 mengenai penetapan dan mulai Berlakunya UU Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 tentang adanya Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Klaten terdiri dari tiga kota kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan kota administratif, namun semenjak diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal lagi adanya istilah kota

administratif, dan Kota Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.

Gambar 1.2

Peta Kabupaten Klaten



Pusat Pemerintahan Kabupaten Klaten berada di Kota Klaten. Luas dari wilayah Kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, yang terbagi atas 391 desa dan 10 kelurahan seperti gambar peta diatas.

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Klaten terbentang pada 110°26'14'' – 110°47'51'' Bujur Timur dan 7°32'19'' – 7°48'33'' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah yang ada sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Boyolali
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Sukoharjo
- c. Sebelah Barat: Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta).
- d. Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Jika dilihat berdasar pada ketinggian dari air laut, 3,72% terletak diantara ketinggian 0 -100 meter diatas permukaan air laut, 12,76% terletak diantara ketinggian 500 - 2500 meter diatas permukaan air laut, dan 85,52 % terletak diantara ketinggian 100 - 500 meter diatas permukaan air laut. Kabupaten Klaten tepat berada diantara 3 kota besar, yaitu Kota Surakarta (36km), Kota Yogyakarta (30km), dan Kota Semarang (100km), dan saling terhubung dengan jalur transportasi yang sudah cukup memadai. Karena ketiga Kota tersebut memiliki berbagai fasilitas yang memadai seperti Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Adi Sutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, dan juga Pelabuhan Laut Tanjung Emas, tentu saja memberikan dampak terhadap pertumbuhan Kabupaten Klaten kearah yang baik dari sisi budaya, pendidikan, ekonomi, sosial, kependudukan, maupun aspek lainnya.

2.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Klaten

Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten yang tersebar pada 26 wilayah kecamatan pada tahun 2015 adalah 1.158.795 jiwa.

Tabel 2.1.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Prambanan	24.133	24.897	49.030	96,93
2	Gantiwarno	16.919	17.540	34.459	96,46
3	Wedi	23.036	24.338	47.374	94,65
4	Bayat	26.075	27.359	53.434	95,31
5	Cawas	24.451	26.079	50.530	93,76

6	Trucuk	34.940	35.661	70.601	97,98
7	Kalikotes	16.475	17.037	33.512	96,7
8	Kebonarum	8.677	9.202	17.879	94,29
9	Jogonalan	26.858	27.479	54.337	97,74
10	Manisrenggo	19.323	20.299	39.622	95,19
11	Karangnongko	15.923	16.641	32.564	95,69
12	Ngawen	20.116	20.418	40.534	98,52
13	Ceper	29.087	29.642	58.729	98,13
14	Pedan	21.065	21.671	42.736	97,2
15	Karangdowo	18.868	19.776	38.644	95,41
16	Juwiring	26.280	27.522	53.802	95,49
17	Wonosari	28.784	29.689	58.473	96,95
18	Delanggu	19.333	20.231	39.564	95,56
19	Polanharjo	17.815	18.740	36.555	95,06
20	Karanganom	19.948	20.917	40.865	95,37
21	Tulung	22.380	23.203	45.583	96,45
22	Jatinom	26.707	27.443	54.150	97,32
23	Kemalang	17.743	18.025	35.768	98,44
24	Klaten Selatan	21.485	21.963	43.448	97,82
25	Klaten Tengah	19.399	20.647	40.046	93,96
26	Klaten Utara	22.960	23.596	46.556	97,3
	Jumlah Total 2015	568.780	590.015	1.158.795	96,4
	2014	566.429	587.599	1.154.028	96,4
	2013	563.989	585.005	1.148.994	96,,41
	2012	646.335	670.572	1.316.907	96,39
	2011	644.362	669.552	1.313.914	96,24

Sumber: *klatenkab.bps.go.id*

Persebaran penduduk berdasarkan kecamatan yang paling banyak berada di Kecamatan Trucuk dengan jumlah penduduk sebanyak 70.601 jiwa (6,09%), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit berada di kecamatan Kebonarum dengan jumlah penduduk sebanyak 17.879 jiwa (1,54%).

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Klaten

Kebudayaan merupakan sebuah fenomena universal sebagai upaya dari tindakan manusia agar dapat meningkatkan jati dirinya di dalam sebuah kehidupan melalui perwujudan cipta, karsa dan juga karya. Dalam sebuah kehidupan sosial, budaya menjadi salah satu aspek yang sangat penting dikarenakan menjadi pedoman dalam bertindak, berbuat serta menentukan sikap. Indonesia sebagai negara yang memiliki multikultural keberagaman budaya, dengan keberadaan bentuk dan coraknya yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kebudayaan menunjukkan dari adanya kesamaan kodrat manusia dari berbagai macam suku, bangsa, dan ras. Setiap kebudayaan membutuhkan wadah, dan masyarakat itulah yang kemudian menjadi wadah dari kebudayaan tersebut, sehingga antara kebudayaan dan juga masyarakat keduanya saling berhubungan. Kabupaten Klaten merupakan sebuah kota yang berada diantara dua kota besar yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dengan lokasi yang terletak di antara 2 kota besar tersebut, maka Kabupaten Klaten juga dikelilingi oleh beberapa kraton yaitu Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran dan Pakualaman. Hal ini lah yang kemudian menjadikan Kabupaten Klaten sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat bahasa Jawa menjadikan bahasa krama untuk berkomunikasi. Jika ditelisik dari sejarah dan juga

latar belakang cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, maka nilai-nilai luhur yang telah menjadi corak dari budaya masyarakat Klaten adalah religius spiritualis dan nasionalisme. Corak kebudayaan ini dapat dilihat dari tradisi, adat istiadat dan wisata rohani yang ada di Kabupaten Klaten.

Sistem adat istiadat yang berada di Kabupaten Klaten karena percampuran antara Jogja dan Solo membuat Kabupaten Klaten memiliki sejumlah kebudayaan adat yang berupa tradisi kegiatan maupun peninggalan dalam bentuk budaya rohani religius seperti kegiatan budaya yang hanya diselenggarakan setahun sekali di Kabupaten Klaten yaitu gebyar syawalan. Gebyar syawalan adalah tradisi menyebar ketupat di saat lebaran oleh para tokoh atau orang yang berwenang dengan bertujuan agar ketupat yang disebar membawa berkah, syawalan ini juga selalu diikuti oleh dengan adanya pasar kaget. Adapula upacara adat istiadat yang lainnya seperti upacara adat pada setiap bulan Jawa pada saat Safar, masyarakat Klaten sering menyebutnya dengan Saparan. Dan salah satu tradisi kebudayaan yang menjadi simbol kegiatan adat religius di Kabupaten Klaten yaitu Yaqowiyu yang merupakan peringatan penyebaran agama islam oleh Ki Ageng Gribig dimana memiliki kegiatan adat dengan ditandai kegiatan penyebaran kue apem, kue ini akan disebarkan dari atas menara Masjid Gedhe Jatinom kepada masyarakat yang berkumpul. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, bagi siapa yang mendapatkan apem ini akan mendapatkan kesejahteraan.

Dengan melihat tradisi kebudayaan yang ada di Kabupaten Klaten tersebut dapat digambarkan bagaimana agama memberikan pengaruh yang cukup besar pada kebudayaan tradisi di lingkungan masyarakat di Kabupaten Klaten. Agama,

salah satunya Islam mengandung simbol-simbol sistem sosio-kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya. Tetapi, simbol-simbol yang menyangkut realitas ini tidak selalu harus sama dengan realitas yang terwujud secara riil dalam kehidupan masyarakat. Menurut pengertian ini, agama dipahami sebagai suatu sistem budaya (*cultural sistem*) (Azra, 1999:11). Fenomena dari pluralitas kultural dan pemahaman agama kemudian menjadi menonjol saat dilihat dari manifestasinya dalam kebudayaan. Hal-hal penting yang berkenaan dengan dialektika agama dan juga pluralitas budaya lokal, perlu diperhatikan karakteristik budayanya yang mencakup wujud isi dan unsur-unsur yang berupa gagasan, aktivitas dan benda.

Kabupaten Klaten mayoritas penduduknya adalah beragam Islam. Dengan kondisi multikultural, di dalam kehidupan masyarakat tidak pernah terjadi sebuah konflik. Agar tidak terjadi konflik antar etnis maupun antar kepercayaan di bentuklah forum yang saling menghargai sesama agama, forum tersebut bertujuan sebagai pengikat agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai di dalam masyarakat. Jika ada acara di Masjid, masyarakat non muslim pun ikut di undang sebagai perwakilan, dan begitu juga sebaliknya, jika ada acara di Gereja masyarakat yang muslim akan diundang. Penduduk asli Kabupaten Klaten merupakan masyarakat pribumi (Jawa), sementara masyarakat yang lain etnis merupakan pendatang.

Sehingga agama dan budaya lokal di Kabupaten Klaten dipandang sebagai dua buah kekuatan yang menyatu dalam realitas sosial dan pada penerapannya, masyarakat Kabupaten Klaten memiliki kecenderungan pada perilakunya dalam

mengutamakan sisi agama dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dan bermusyawarah. Keadaan dimasyarakat yang padat penduduk sekalipun hubungan antar warga dalam kehidupan sosial sangat erat. Kekeluargaan masih sangat tampak dari kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kegiatan gotong royong antar warga. Ketika salah satu warga mempunyai pekerjaan atau sedang tertimpa musibah warga saling guyup rukun tolong-menolong. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana agama mempengaruhi gaya hidup dari pola perilaku di lingkungan masyarakat itu sendiri.

2.1.4. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Klaten

Masyarakat Kabupaten Klaten mulai mengarah pada tahap pada budaya politik partisipan namun masih belum meninggalkan subjek kaula dan parokial. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Kabupaten Klaten yang menyentuh angka 63,04 % dari total jumlah pemilih tetap yang ada pada pemilihan Bupati tahun 2015.

Tabel 2.2.

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Klaten Utara	8	63	18.381	19.287	37.668
2	Klaten Tengah	9	58	16.139	17.321	33.460
3	Klaten Selatan	12	62	17.024	18.572	35.596
4	Kalikotes	7	51	14.849	15.579	30.428
5	Ngawen	13	65	17.493	18.067	35.560
6	Kebonarum	7	31	7.801	8.468	16.269
7	Wedi	19	79	21.466	22.744	44.210
8	Jogonalan	18	83	23.348	24.212	47.560

9	Gantiwarno	16	60	15.807	16.705	32.512
10	Prambanan	16	74	19.562	20.901	40.463
11	Manisrenggo	16	64	16.496	17.851	34.347
12	Kemalang	13	53	14.425	14.862	29.307
13	Karangnongko	14	56	14.440	15.519	29.959
14	Jatinom	18	86	23.506	24.483	47.989
15	Karanganom	19	71	18.469	19.366	37.835
16	Tulung	18	82	22.484	23.783	46.267
17	Polanharjo	18	64	15.977	16.999	32.976
18	Delanggu	16	65	17.099	18.085	35.184
19	Ceper	18	90	25.395	26.242	51.637
20	Juwiring	19	87	23.044	24.316	47.360
21	Wonosari	18	91	25.058	26.373	51.431
22	Pedan	14	71	18.865	19.395	38.260
23	Trucuk	18	115	32.062	32.943	65.005
24	Karangdowo	19	73	18.734	19.642	38.376
25	Bayat	18	96	26.216	26.821	53.037
26	Cawas	20	90	24.713	25.774	50.487
	Jumlah	401	1880	508.853	534.330	1.043.183

Sumber : KPU Kabupaten Klaten, 2019

Pada tahun 2015 berdasarkan data KPU di atas diperlihatkan bahwa jumlah total dari pemilih tetap pada pemilihan Bupati Kabupaten Klaten adalah 1.043.183 jiwa yang mana terdiri dari 508.853 laki-laki dan 534.330 perempuan. Data jumlah pemilih tetap yang berada diatas adalah orang-orang yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati pada tahun 2015 yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan KPU. Pada pemilihan Bupati tahun 2015 tersebut ada 657.631 jiwa yang menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin Kabupaten Klaten periode 2015-2020. Dari 657.631 jiwa yang menggunakan hak pilihnya, terbagi menjadi tiga pilihan yaitu:

Tabel 2.3.**Rekapitulasi Jumlah Suara Pemilihan Bupati 2015**

Nama Cabup-Cawabup Klaten 2015			Total Suara
Fauzan - Mustafid	One Krisnata - Sunarto	Sri Hartini - Sri Mulyani	
62.849	273.189	321.593	657.631
9,56%	41,54%	48,90%	100%

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2019

Dari data rekapitulasi diatas diperoleh kesimpulan bahwa ada 657.631 jiwa yang menggunakan hak suara atau hak pilihnya pada pemilihan Bupati tahun 2015, dan terbagi pada masing masing calon yaitu 62.849 pada Mustafid, 273.189 jiwa pada One Kristata, dan 321.593 jiwa pada Sri Hartini. Dan dari hasil rekapitulasi diatas di dapatkanlah Sri Hartini sebagai Bupati terpilih pada periode 2015-2020.

Dari hasil pemilihan umum Bupati tahun 2015 dapat diperoleh data tingkat partisipasi masyarakat yang menunjukkan bahwa keikut sertaan masyarakat dalam demokrasi dan politik belum mengarah ke budaya partisipan dimana hanya 63,04% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yang mana rata-rata partisipasi PILKADA secara nasional adalah diangka 73,24%. Kecenderung sikap politik dari masyarakat Klaten ini cenderung mengarah pada kepada subjek kaula yang mana masyarakat memiliki kesetiaan atau loyalitas kepada sosok pemimpinnya, dalam hal ini di Kabupaten Klaten terbentuk dari sebuah pola hierarkis yang mana membuat arah pilihan masyarakat terpusat pada seseorang atau tokoh yang kemudian membuat Kabupaten Klaten terkenal dengan pola politik kekerabatannya.

Meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat sudah mulai cukup meningkat, tidak menunjukkan bahwa budaya partisipan secara murni telah terwujud, melainkan budaya campuran antara budaya politik partisipan dengan parokial serta subjek kaula. Budaya politik masyarakat di Kabupaten Klaten yang bersifat subjek kaula dengan arah perubahan yang masih lambat mengarah pada budaya politik partisipan inilah yang membentuk sistem pemerintahan kurang partisipatif karena masih mengandalkan ketokohan seorang pemimpin. Hal inilah yang pada awalnya akan menghambat progres perkembangan dari jenis dan sistem kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

2.2. Profil Pemerintah Kabupaten Klaten

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dasar terbentuknya Pemerintah Daerah Klaten adalah UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkupan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU No. 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibukota Kabupaten Klaten terletak di Kota Klaten, yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan kota administratif, tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.

Gambar 1.3.

Lambang Pemerintah Kabupaten Klaten



Sumber: www.klatenkab.go.id

Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2016-2021 memiliki visi dan misi dalam menjalankan roda pemerintahannya dalam memperjelas target dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN
BERDAYA SAING”**

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten kedepan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu dan dapat bersaing di segala bidang.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Selanjutnya, Program Utama yang menjadi prioritas kabupaten Klaten adalah:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
2. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan.
3. Program Pengembangan Ekonomi Daerah.
4. Program Peningkatan Infrastruktur Publik.
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Program Peningkatan Kualitas Masyarakat.
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
8. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.

2.3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten terdiri dari; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Lembaga Teknis Daerah; Dinas Daerah; Kecamatan; dan Kelurahan.

2.3.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Posisi sekretaris daerah dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil berpangkat eselon II A. Sekretaris daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinir dinas dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

No.	Jabatan	Pejabat	Eselon
1	Sekretaris Daerah	Drs. Jaka Sawaldi, MM	II a
2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	H. Joko Wiyono, S.Sos, MM	II b
3	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Ir. Drs. Abdul Mursyid, MT	II b
4	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Ir. Wahyu Prasetyo, M.Si	II b
5	Asisten I Pemerintahan dan KesRat	Dr. Ronny Roekmito, M.Kes	II b
6	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Hari Budiono, SH	III a
7	Kabag Kesejahteraan Rakyat	<i>(dijabat Pelaksana tugas)</i>	III a
8	Kabag Hubungan Masyarakat	Wahyudi Martono, S.Sos, MM	III a
9	Asisten II Ekonomi dan Pembangunan	Drs. Purwanto Anggono C, M.Si	II b
10	Kabag Perekonomian	Ir. Cahyo Dwi Setyanta, M.Si	III a
11	Kabag Pembangunan	<i>(dijabat Pelaksana tugas)</i>	III a
12	Kabag Layanan Pengadaan Barang & Jasa	Muh. Anwar Shodiq, SE, ST, MT	III a
13	Asisten III Administrasi Umum	H. Sri Winoto, SH	II b
14	Kabag Organisasi	Bambang Sujarwa, SE, MM	III a
15	Kabag Hukum	Hj. Luciana Rina D, S.IP, MM	III a
16	Kabag Umum	Rina Nugroho WD, S.AP, MH	III a

Sumber : BKPPD Kab. Klaten 2019

2.3.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten

No .	Jabatan	Pejabat	Eselon
1	Sekretariat DPRD	Anang Widjatmoko, SH, MM	II b
2	Kabag Umum	Dra. F. Pratiwi Dwi , M.Si	III a
3	Kabag Perundang-undangan, Aspirasi dan Dokumentasi	(kosong)	III a
4	Kabag Persidangan dan Kehumasan	Joko Trriyanto, SH, MH	III a

Sumber : BKPPD Kab. Klaten 2019

2.3.3. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, susunan lembaga teknis daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Susunan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Klaten

No.	Lembaga Teknis Daerah	Pejabat	Eselon
1	Inspektorat	Jajang Prihono, SSTP (Plt)	III a
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Sugeng Haryanto, SE, MM	II b
3	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sigit Gatot Budiyanto, SE, MM	III a
4	RSUD Bagas Waras	Joko Santosa, S.Sos, M.Si	II b

5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Surti Hartini, SH.CN	II b
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sip Anwar, SE, M.Si	II b
7	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Muh. Himawaan P, SSTP, M.Si	II b
8	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	M. Umar Said, S.Hut, MPP, M.Eng	II b

Sumber: BKPPD Kab. Klaten 2019

2.3.4. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan -susunan dinas daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Susunan Dinas Daerah Kabupaten Klaten

No	Dinas	Pejabat	Eselo n
1	Dinas Pendidikan	Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd	III a
2	Dinas Kesehatan	Dr. Cahyono Widodo, M.kes	II b
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jaka Purwanto, S.Sos, MM	II b
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Drs. Widiyanto, M.Pd (Plt)	III a
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Drs. Bambang Sigit S, MM	II b
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir. Tajudin Akbar	II b
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Drs. Sartiyasto, MM	II b

8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pramana Agus W, ST, M.Si	II b
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Srihadi, ST, MM	II b
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Drs. Amin Mustofa, M.Si	II b
11	Dinas Perhubungan	Drs. Slamet Widodo, MM	II b
12	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Syahruna, SH	II b
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Drs. Agus Suprpto, M.Si	II b
14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ir. Widiyanti, M.Si	II b
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. Widya Sutrisna, M.Si	II b
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Drs. Much. Nasir, MM	II b

Sumber : BKPPD Kab. Klaten 2019

2.3.5. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, susunan kecamatan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Susunan Kecamatan Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Pejabat	Eselon
1	Klaten Tengah	Widayatna, SE, M.Si	III a
2	Klaten Selatan	Joko Hendrawan, SH, MM	III a
3	Klaten Utara	Marjana, S.IP, MH	III a
4	Wedi	Kukuh Riyadi, SH, MH	III a

5	Kebonarum	Sutopo, SIP, M.Si	III a
6	Ngawen	Ir. Anna Fajria Hidayati, M.Si	III a
7	Kalikotes	Sarno, SE	III a
8	Jogonalan	M. Widodo Kusnin S, SIP, MH	III a
9	Gantiwarno	Lilis Yuliati, SH, MH	III a
10	Prambanan	Drs. Suhardi, MM	III a
11	Manisrenggo	Drs. Sumaryono (Plt)	III b
12	Kemalang	Budi Prasetyo, S.Sos (Plt)	III b
13	Karangnongko	Drs. Jaka Supriyanto	III a
14	Jatinom	(kosong)	III a
15	Tulung	H. Rohmad Sugiarto, S.IP	III a
16	Karanganom	Drs. Slamet Samodra K, MM	III a
17	Polanharjo	Drs. Miliat Dwi Ariana, M.Si	III a
18	Delanggu	Sri Wahyuni, SH, MH	III a
19	Wonosari	H. Mochamad Nurrosyid, S.IP	III a
20	Ceper	Supriyono, S.Sos	III a
21	Juwiring	Herlambang Jaka S, SE, M.Si	III a
22	Pedan	Drs. Wahyuni Sri Rahayu, M.Si	III a
23	Karangdowo	Tomisila Adhitama, SAP, MM	III a
24	Cawas	Drs. Sofan, M.Si	III a
25	Bayat	Edy Purnomo, SE	III a
26	Trucuk	Bambang Haryoko, S.Sos, MM	III a

Sumber : BKPPD Kab. Klaten 2019

2.3.6. Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah. Berdasarkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, susunan kelurahan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9.**Susunan Kelurahan Kabupaten Klaten**

No	Kelurahan	Pejabat	Eselon
1	Klaten Tengah - Klaten Tengah	Aris Fitriyanto, S.IP, M.Si	IV a
2	Kabupaten - Klaten Tengah	Hartini, S.IP	IV a
3	Tonggalan - Klaten Tengah	Solichin, Sm.Hk (Plt)	IV b
4	Bareng - Klaten Tengah	Sumarjo, S.Sos (Plt)	IV b
5	Buntalan - Klaten Tengah	Bambang Sumadi	IV a
6	Mojayan - Klaten Tengah	Sarwadi, S.Sos	IV a
7	Gayamprit - Klaten Selatan	Tentrem, S.Sos	IV a
8	Bareng Lor - Klaten Utara	N. Nunung Zulaida, SE, MM	IV b
9	Gergunung - Klaten Utara	Sugeng Slameta	IV a
10	Jatinom – Jatinom	Agus Suprpto, S.Sos	IV a

Sumber : BKPPD Kab. Klaten 2019